

Penguatan **Partisipasi Masyarakat** dalam Implementasi PUG

Panel Diskusi – Diseminasi Penelitian Bappenas-SKALA SMERU 25 Mei 2026

Permata Sari, SKM, MKM

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender

Tantangan Implementasi PUG

Koordinasi lintas sektor masih terfragmentasi

Keterbatasan data terpilah gender dan inklusi sosial

Kapasitas pemerintah daerah belum merata

Partisipasi OMS masih prosedural dan belum substantif

Akses OMS terhadap proses penganggaran masih terbatas

Penguatan Kebijakan dan Regulasi PUG

Permen PPPA tentang Tata Cara Penyelenggaraan PUG

Penyusunan RPerpres Strategi Nasional Percepatan PUG

Penguatan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran

Integrasi gender dalam seluruh siklus pembangunan

PUG didorong menjadi tata kelola pembangunan, bukan program sektoral

Strategi Memastikan Partisipasi Bermakna

Penguatan Musrenbang **inklusif gender** dan kelompok rentan

Pemanfaatan data **terpilah gender** dan inklusi sosial

Penguatan kapasitas OMS dan pemerintah daerah

Penguatan forum multipihak dan dialog rutin

Mendorong **evidence-based** policy dan akuntabilitas

Forum PUSPA sebagai Ruang Advokasi Substantif

Bukan sekadar forum konsultasi seremonial

Menjadi **ruang konsolidasi** isu dan rekomendasi kebijakan

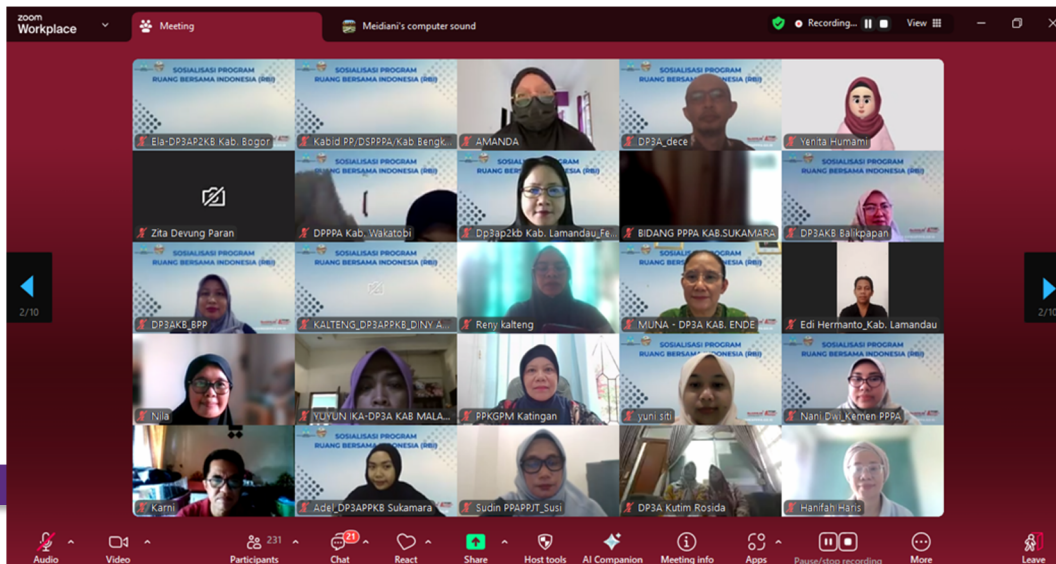
Terhubung dengan RKPD, Renja OPD, dan penganggaran daerah

Melibatkan perempuan, anak, disabilitas, akademisi, media, dan dunia usaha

Memiliki **mekanisme tindak lanjut** dan umpan balik

PUSPA akan ditindaklanjuti masuk dalam RBI

Rapat Koordinasi RBI bersama Forum PUSPA Provinsi Juni 2025 reaktivasi
SOSIALISASI RBI BAGI PEMERINTAH PROVINSI 24 April 2026



Ruang Bersama Indonesia (RBI)



Gerakan **kolaboratif lintas sektor** berbasis desa dan kelurahan

Melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan mitra pembangunan

Mendorong partisipasi aktif perempuan dan anak

Mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Mendorong pembangunan desa/kelurahan **responsif gender dan peduli anak**

3 Variabel 10 Indikator



Ruang Bersama Indonesia (RBI)

Variabel	Indikator
1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Desa & Kelurahan yang Responsif Gender dan Peduli Anak	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan dan keaktifan organisasi perempuan dan anak di desa & kelurahan2. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak3. Kebijakan Desa Responsif Gender dan Peduli Anak4. Dukungan Pembiayaan dan Aset Desa untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak5. Partisipasi Aktif Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Desa
2. Penerapan Program Pemberdayaan Perempuan di Desa & Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perempuan2. Pemenuhan Hak Kesehatan, Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan
3. Pelaksanaan Upaya Perlindungan Perempuan & anak di Desa & Kelurahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan hak anak2. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, termasuk TPPO3. Pencegahan dan Penanganan Praktek Pekerja Anak4. Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak

Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga

Bappenas:

integrasi PUG dalam RPJPN, RPJMN, RPJMD, dan RKPD

Kemendagri:

Penguatan pembinaan pemerintah daerah

Mendorong isu perempuan dan anak masuk lintas OPD

Penguatan PPRG, GAB

Penguatan pembinaan dan pengawasan ke daerah

Pembuatan SKB 3 Menteri tentang RBI

Pembuatan Permen tentang RBI

Buku Operasional RBI

Kesemuanya mengangkat

pelibatan partisipasi aktif LM, DU, PT, Media



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 3/MENPPPA/SKB/IV/2026 TAHUN 2026
NOMOR: TAHUN 2026
NOMOR: TAHUN 2026
TENTANG
RUANG BERSAMA INDONESIA UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DAN
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penarusutamaan gender, pemberdayaan

KOLABORASI DENGAN K/L, LEMBAGA MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN RBI

BADAN IDEOLOGI PEMBINAAN PANCASILA (BPIP)

"Sinergi Penguatan Nilai Pancasila Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" dan juga telah disepakati pula Rencana Aksi Tahun 2026

GRAB INDONESIA

peningkatan kapasitas para perempuan di Kelurahan Marunda dalam memproduksi kuliner secara mandiri, memiliki toko online, serta aktif berjualan di platform ecommerce

ASWGI (Asosiasi Pusat Studi Wanita / Gender & Anak Indonesia)

1) penguatan penelitian dan kebijakan di bidang KGPPA 2) integrasi perspektif gender dalam kurikulum dan pendidikan tinggi, 3) peningkatan kapasitas SDM, penyediaan dan pertukaran data gender dan anak, 4) penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis komunitas dan perguruan tinggi,

ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia)

bergerak di bidang penjaminan kredit, asuransi, dan pengelolaan risiko, khususnya dalam mendukung UMKM, diharapkan dapat mendukung pengintegrasian perspektif gender dan pemenuhan hak anak

KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)

memiliki kapasitas dalam pengorganisasian perempuan, pendidikan kesadaran hak, aktif bersama jaringan masyarakat sipil lainnya dalam mengadvokasi kebijakan afirmatif, termasuk terkait keterwakilan perempuan di parlemen, serta implementasi pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

KOLABORASI DENGAN K/L, LEMBAGA MASYARAKAT, PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN RBI

Yayasan Care

memiliki pengalaman dalam penguatan kelompok perempuan, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga, respons kemanusiaan yang sensitif gender, serta perlindungan anak dalam situasi darurat

Mustika Ratu

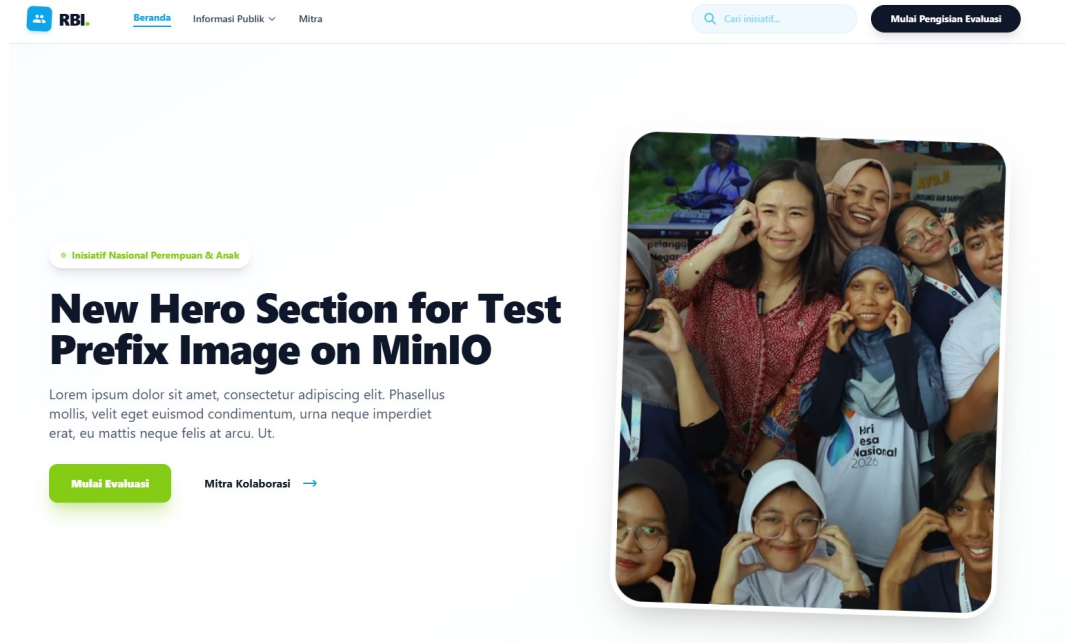
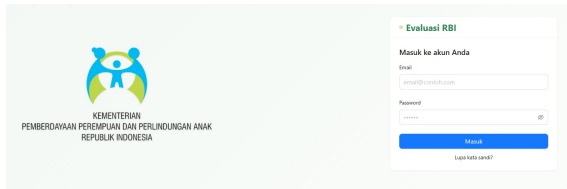
tahun 2026, Kemen PPPA dan PT Mustika Ratu akan melaksanakan kolaborasi dalam penguatan kapasitas perempuan melalui berbagai kegiatan peningkatan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan ekonomi produktif, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di wilayah RBI

XL SMART

penyediaan akses internet gratis selama satu tahun untuk 30 lokasi RBI di berbagai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Jawa Tengah, Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo

tahun 2026, direncanakan perluasan dukungan penyediaan akses internet gratis untuk 70 Lokasi RBI lainnya

PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN WEBSITE PEMANTAUAN DAN EVALUASI RBI



Upaya Melihat Umpan Balik

Penutup

Keberhasilan PUG memerlukan **kolaborasi multipihak**
Partisipasi masyarakat harus **bermakna dan berkelanjutan**
PUG perlu menjadi bagian integral **tata kelola pembangunan**
Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci pembangunan inklusif